

ABSTRAK

Dalam rangka untuk mempercepat program penanggulangan kemiskinan agar bisa berjalan masif, Pemerintah Indonesia melakukan kordinasi penanggulangan kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia yang menyatakan bahwa secara struktur langsung diketuai oleh wakil Gubernur di tingkat Provinsi dan Wakil Bupati / wakil Walikota di tingkat Kabupaten / kota dalam rangka untuk percepatan penanggulan kemiskinan di daerah daerah yang disebut dengan Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik tingkat Provinsi serta Kabupaten dan Kota. Tujuan penelitian adalah mengkaji dan menganalisis: 1) kebenaran kontruksi kebijakan daerah dalam program pengentasan kemiskinan yang belum mensejahterakan, 2) kelemahan dalam program pengentasan kemiskinan dan 3) merekontruksi kebijakan daerah dalam program pengentasan kemiskinan berbasis nilai kesejahteraan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan paradigma penelitian hukum konstruktivisme. jenis penelitian deskriptif analitis. Metode pendekatan dalam penelitian menggunakan metode Yuridis sosiologis. Analisis data penelitian dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitiannya adalah 1) Konstruksi kebijakan Daerah dalam program pengentasan kemiskinan belum mensejahterakan masyarakat, terlihat dari angka kemiskinan yang tinggi diatas 2 digit (2,68 juta penduduk) , 20 dari 35 Kabupaten/Kota masih tinggi angka kemiskinan, rendahnya mata pencaharian berkelanjutan, dan rendahnya akses kehidupan dasar warga. 2) Kelemahan Kelemahan di dalam kebijakan Daerah dalam pengentasan kemiskinan mencakup 5 hal yaitu :1.Perumusan Kebijakan Daerah Dalam Pengentasan kemiskinan bersifat *Top Down*, 2.Terjadi Tumpang Tindih Kelembagaan dalam pengentasan kemiskinan Jawa Tengah, 3.Kebijakan Pengentasan kemiskinan Tidak Menyimak Peta Kemiskinan secara Riil, 4. Lemahnya Peran DPRD Kabupaten dalam Kebijakan Pengentasan Kemiskinan,5. Rendahnya Partisipasi pihak ketiga dan Dunia Usaha dalam Program pengentasan Kemiskinan. 3) Rekonstruksi Kebijakan Daerah dalam program pengentasan kemiskinan berbasis nilai kesejahteraan sebagai berikut : A) Rekonstruksi pasal 4 Permendagri No 42 tahun 2010 yaitu menambahkan strategi pengentasan kemiskinan dengan memberikan pinjaman dari pintu ke pintu dalam rangka menjangkau masyarakat miskin yang tidak tersentuh Lembaga keuangan formal dan mengucurkan dana investasi ke infrastruktur social ekonomi di daerah miskin, B) Rekonstruksi pasal 9 Permendagri no.42 tahun 2010 bahwa tugas dan fungsi TKPK Jawa Tengah perlu untuk melakukan kordinasi fungsi SKPKD bidang penanggulangan kemiskinan dalam penyusunan Big Data masyarakat miskin dan C) Rekonstruksi Peraturan Gubernur No.60 tahun 2019 Bab IV pasal 6 dengan menaikkan anggaran program pengentasan kemiskinan dengan memaksimalkan dana CSR BUMN.

Kata Kunci : Kebijakan Daerah, Kesejahteraan, Pengentasan Kemiskinan, Rekonstruksi.

ABSTRACT

In order to accelerate the poverty reduction program so that it can run massively, the Government of Indonesia coordinates poverty alleviation for Provinces and Regencies / Cities throughout Indonesia which states that the structure is directly chaired by the Deputy Governor at the Provincial level and the Deputy Regent / Deputy Mayor at the Regency / City level in the context of for the acceleration of poverty reduction in regional areas called the Poverty Reduction Coordination Team (TKPK), both at the provincial and district and city levels. The research objective is to study and analyze: 1) the truth of the construction of regional policies in poverty alleviation programs that have not been prosperous, 2) weaknesses in poverty alleviation programs and 3) reconstruct regional policies in poverty alleviation programs based on welfare values.

This study uses a constructivist legal research paradigm approach. type of analytical descriptive research. The approach method in research using sociological juridical methods. Analysis of research data using descriptive qualitative.

The results of the research are 1) The construction of regional policies in poverty alleviation programs has not yet prospered the community, as seen from the high poverty rate above 2 digits (2.68 million people), 20 out of 35 districts / cities still have high poverty rates, low sustainable livelihoods, and low access to basic life for residents. 2) Weaknesses Weaknesses in Regional policies in poverty alleviation include 5 things, namely: 1. The formulation of Regional Policies in Poverty Alleviation is Top Down, 2. There is Overlapping of Institutions in Central Java's poverty alleviation, 3. Poverty alleviation policies do not pay attention to the Real Poverty Map, 4. Weak Role of District DPRD in Poverty Alleviation Policies, 5. Low Participation of third parties and the business world in poverty alleviation programs. 3) Reconstruction of Regional Policies in poverty alleviation programs based on welfare values as follows: A) Reconstruction of Article 4 Permendagri No 42/2010, namely adding a poverty alleviation strategy by providing door-to-door loans in order to reach the poor who are not touched by formal financial institutions and disburse investment funds into socio-economic infrastructure in poor areas, B) Reconstruction of Article 9 Permendagri No.42 of 2010 that the duties and functions of the Central Java TKPK are necessary to coordinate the functions of the SKPKD in the field of poverty reduction in the preparation of Big Data for the poor and C) Reconstruction of Governor Regulation No.60 of 2019 Chapter IV Article 6 by increasing poverty alleviation program budget by maximizing BUMN CSR funds.

Keywords: Regional Policy, Welfare, Poverty Alleviation, Reconstruction.